



PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENAGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN SIDOARJO

Fitra Adinia Rahmi, Arimurti Kriswibowo

Program Studi Administrasi Publik,

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstrak

Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur yang turut menyumbang pengidap HIV/AIDS dengan jumlah yang besar dengan menempati peringkat ketiga pengidap HIV tertinggi di Jawa Timur. Angka kasus HIV AIDS di Kabupaten Sidoarjo yang terus bertambah menjadi tugas bersama bagi para stakeholder untuk bekerja sama dalam mencari solusi bagi permasalahan ini. Adanya kolaborasi dari Parpas, KPA, serta Dinas Kesehatan diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan tingginya pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo menuju Zero AIDS. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses collaborative governance dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokus penelitian bertempat di Paguyuban Remaja Peduli HIV/AIDS Kabupaten Sidoarjo (PARPAS). Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa proses collaborative governance telah dilaksanakan dengan baik yang dilihat berdasarkan lima fokus yaitu Face to Face Dialog (Dialog Tatap Muka) yang menunjukkan bahwa sudah berjalan secara efektif dengan adanya pertemuan rutin dalam membahas proses kolaborasi, selanjutnya Trust Building (Membangun Kepercayaan) memperlihatkan sudah terbangunnya kepercayaan antar stakeholder dalam proses kolaborasi ini, fokus Share Understanding (Berbagi Pemahaman) dilakukan dengan dilakukannya komunikasi yang baik dan efektif serta nilai saling menghormati, kemudian fokus Commitment to Process (Komitmen Terhadap Proses) memperlihatkan bahwa antar stakeholder memiliki komitmen yang tinggi dalam program kolaborasi, fokus terakhir Intermediate Outcome (Hasil Sementara) memperlihatkan bahwa sudah terdapat beberapa output nyata hasil kolaborasi antar stakeholder dalam proses kolaborasi.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Penanggulangan HIV/AIDS.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang hingga saat ini giat dalam menjalin kerja sama dengan negara lain. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Indonesia dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dilaksanakan di New York pada tahun 2015. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintahan dunia menghadiri pertemuan tersebut untuk meresmikan agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Hal ini menandakan berakhirnya *Millenium Development Goals (MDGs)* dan memasuki agenda baru pembangunan global yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Kesehatan menjadi salah satu faktor penting dalam perwujudan SDGs, karena kesehatan sendiri akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di suatu negara serta berdampak pada produktivitas dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Seluruh isu kesehatan dalam SDGs diintegrasikan dalam satu tujuan yakni tujuan nomor 3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.

Program yang diusung untuk mewujudkan SDGs dalam bidang kesehatan adalah Program Indonesia Sehat dengan 3 pilar yakni paradigma sehat, pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Salah satu isu kesehatan yang belum tuntas dalam perwujudan SDGs yaitu HIV (*Human Immuno deficiency virus*) dan AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrom*).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI)

mencatat, jumlah kasus HIV terus meningkat sejak 2010-2019. Angkanya pun mencapai 50.282 kasus pada 2019, naik 7,78% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, jumlah kasus AIDS cenderung fluktuatif mengarah ke penurunan. Bahkan, Kemenkes mencatat kasus AIDS berkurang 30,95% menjadi 7.036 kasus pada 2019. Jumlah tersebut menjadi yang terendah sejak 2010. Berdasarkan provinsi, HIV paling banyak terjadi Jawa Timur, yakni 8.935 kasus (Rizaty, 2021).

Provinsi Jawa Timur menempati posisi pertama dengan jumlah kumulatif HIV AIDS tertinggi di Indonesia, yaitu pengidap HIV sejumlah 58.673 orang dan penderita AIDS sebanyak 20.904. Temuan kasus HIV yang cukup tinggi dapat menjadi langkah yang baik karena pengidap dapat melakukan terapi dan tetap dalam himbuan oleh tenaga kesehatan, sehingga hal ini dapat menekan penularan virus. Namun yang perlu menjadi perhatian ialah mengenai cara mempertahankan pengidap HIV agar tidak menjadi penderita AIDS. Diperlukan pengawasan tiap daerah di provinsi untuk melaksanakan hal tersebut agar tercapai tujuan nasional.

Dalam hal ini Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur yang turut menyumbang pengidap HIV AIDS dengan jumlah yang besar. Dilansir dari jawapos.com (Sholahuddin, 2021) Kabupaten Sidoarjo menempati peringkat ketiga dengan pengidap HIV tertinggi di Jawa Timur.

Angka kasus HIV AIDS di Kabupaten Sidoarjo yang terus bertambah menjadi tugas bersama stakeholder untuk bekerja sama dalam mengatasinya baik dari PARPAS, KPA, maupun Dinas Kesehatan. Dalam hal ini Collaborative Governance dapat menjadi

langkah yang tepat dalam mengatasi penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo. Mengingat HIV AIDS dalam hal penanganan cukup kompleks maka apabila diatasi dengan Collaborative Governance setiap aktor akan mendapatkan peran serta dapat menjalin kerja sama dengan tujuan yang sama. Sejalan dengan hal tersebut Collaborative Governance tidak dapat berjalan apabila hanya dilaksanakn satu pihak, karena sejatinya dalam konsep ini mendorong terjalin kemitraan antar negara, swasta, serta masyarakat sipil. Hal ini sesuai dengan kondisi penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Sidoarjo yang melibatkan berbagai sektor. Dengan demikian penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai “Proses Collaborative Governance dalam Penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Sidoarjo.”

METODE PENELITIAN

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini tergolong pada penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Terdapat dua sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur yang turut menyumbang pengidap HIV AIDS dengan jumlah yang besar. Dilansir dari jawapos.com (Sholahuddin, 2021). Kabupaten Sidoarjo menempati peringkat ketiga dengan pengidap HIV tertinggi di Jawa Timur. Angka kasus HIV AIDS di Kabupaten Sidoarjo yang terus bertambah menjadi tugas bersama stakeholder untuk bekerja sama dalam mengatasinya baik dari PARPAS, KPA, maupun dinas kesehatan. Dalam hal ini Collaborative Governance dapat menjadi langkah yang tepat dalam mengatasi penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo. Secara umum, collaborative governance menurut Cordery dan

Hartman yang dikutip oleh (Febrian, 2016) adalah suatu proses yang di dalamnya para stakeholder terlibat dan terikat untuk menempatkan kepentingan dari masing-masing instansi untuk mencapai tujuan bersama. Collaborative governance merupakan paradigma baru dalam memahami eksistensi multi aktor dalam urusan-urusan publik. Para akademisi mulai tertarik pada perkembangan konsep yang disebut dengan istilah collaborative governance dalam beberapa dekade terakhir. Ansell & Gash dalam (Ansell & Gash, 2008), salah satunya mendefinisikan collaborative governance sebagai berikut:

Collaborative governance merupakan sebuah model pengendalian yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik).

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya dapat diketahui bahwa proses kolaborasi yang didasarkan pada pernyataan Ansell & Gash (2008) dapat dilihat telah sesuai dengan apa yang menjadi pokok penilaian tingkat optimalisasi pelaksanaan Collaborative governance. Pertama, dalam hal ini terdapat tiga stakeholder yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan kolektif secara formal. Dalam hal ini yaitu Dinas Kesehatan, KPA, dan Parpas terlibat langsung dalam pengambilan keputusan untuk proses kolaborasi penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya menurunkan tingkat infeksi HIV/AIDS mengingat Kabupaten Sidoarjo menempati posisi ketiga dengan infeksi tertinggi di Jawa Timur. Kemudian untuk musyawarah

dilakukan dengan cara tatap muka maupun secara daring sehingga dapat berlangsung sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya Agranoff dan McGuire yang dikutip oleh Chang (2009) menyebutkan bahwa collaborative governance telah menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi sukarela dan hubungan horizontal antara partisipan multi sektoral, karena tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, dan membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. Kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan governance menjadi terstruktur sehingga efektif memenuhi meningkatnya permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintahan, organisasi dan batas sektoral.

Berdasarkan pernyataan tersebut juga proses kolaborasi antar stakeholder dalam penanggulangan HIV/AIDS di Sidoarjo memang sangatlah diperlukan untuk memenuhi solusi dari peningkatan kasus HIV/AIDS di daerah ini. Dengan pengelolaan yang baik program hasil dari proses kolaborasi ini tentunya diharapkan akan menjadi solusi bagi permintaan yang berupa permasalahan peningkatan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo.

Terkait dengan pendapat Ansell & Gash (2008) mengenai proses kolaborasi diuraikan kembali kedalam empat fokus pembahasan utama yaitu Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialog*), Membangun Kepercayaan (*Trust Building*), Komitmen terhadap proses (*Commitment to Process*), Pemahaman Bersama (*Share Understanding*) dan Hasil Sementara (*Intermediete Outcomes*).

Fokus Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialog*) dalam proses collaborative governance dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik dimana dialog tatap muka dilakukan oleh

para stakeholder terkait dalam hal ini yaitu KPA, Dinas Kesehatan dan Parpas Kabupaten Sidoarjo. Menurut Alamsyah et al., (2019) dialog tatap muka merupakan sarana yang memberikan kepercayaan dalam menyatukan program yang ditetapkan secara bersama. Kemudian Arrozaaq, D. L. C. (2016) menjelaskan bahwa dialog tatap muka yang dilakukan ini bertujuan untuk berbagi informasi, tujuan bersama serta pemahaman satu sama lain. Sejalan dengan hal ini Kinerja sangat penting untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya Kriswibowo et al., (2018). Dalam penelitian ini, dialog tatap muka ini sebelumnya dilakukan tiga hingga empat kali dalam satu tahun secara rutin namun sejak pemberlakuan pembatasan sosial dan pemotongan dana dari APBD sebagai akibat dari Pandemi maka diubah menjadi satu kali dalam satu tahun.

Fokus kedua yaitu *Trust Building* (Membangun Kepercayaan) juga telah berjalan secara efektif dimana kepercayaan yang dibangun oleh masing – masing stakeholder berkaitan erat terhadap komitmen yang terjalin pada program kolaborasi yang telah di implementasikan. Selain komitmen, dalam membangun kepercayaan ini juga meliputi proses komunikasi yang baik dan transparansi antar masing – masing pemangku kebijakan sehingga dengan kedua aspek tersebut yang berjalan dengan baik maka akan meningkatkan kepercayaan satu stakeholder dengan stakeholder yang lain untuk menciptakan kualitas yang baik bagi proses kolaborasi ini. Sebab dengan adanya transparansi akan menjadikan proses kolaborasi berjalan dengan lancar Tilano, F. A., & Suwitri, S. (2017). Sebagaimana pendapat Siswanto & Aldridge dalam Pratolo (2008), yang mengatakan adanya pengungkapan informasi organisasi secara transparan

kepada para pemangku kepentingan memiliki peran yang besar, antara lain informasi tersebut menjadi salah satu sarana penting bagi stakeholder untuk mengawasi jalannya kegiatan organisasi.

Fokus Ketiga adalah *Share Understanding* (Berbagi Pemahaman) menurut hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pada fokus ini sudah berjalan secara efektif dimana antar stakeholder mulai membangun kesepemahaman dalam proses kolaborasi. Kesepemahaman ini dibangun dengan saling memahami antar lintas usia dimana Parpas mewakili generasi muda dan KPA serta Dinkes merupakan seior yang bertugas dalam menyusun konsep kolaborasi. Selain itu dalam membangun kesepemahaman juga tidak lepas dari pengambilan keputusan yang tentu saja tidak lepas dari hasil kesepakatan bersama yang disetujui oleh semua pihak terkait sebab dalam hal ini merupakan proses kolaborasi. Kemudian, Niluh. E.P.S, & Krisiwbowo. A (2023) menjelaskan bahwa bentuk upaya membangun pemahaman bersama antar stakeholders dilakukan dengan koordinasi dan musyawarah. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dilihat bahwa kesepemahaman bersama dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo dibangun dengan saling memahami dan dilakukannya diskusi antar lintas usia dimana Parpas mewakili generasi muda dan KPA serta Dinkes merupakan seior yang bertugas dalam menyusun konsep kolaborasi.

Fokus *Commitment to Process* (Komitmen Terhadap Proses) dapat dilihat dari komitmen yang terjalin antar stakeholder yang terlibat Ansell & Gash (2008) dan dalam proses kolaborasi penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo ini sudah berjalan dengan baik, dimana masing – masing perwakilan stakeholder menyatakan bahwa proses kolaborasi dilakukan dengan komitmen yang tinggi terbukti dari terlaksananya

beberapa program kolaborasi dengan baik dan sesuai rencana.

Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan dari Bustomi et al., (2022) yang menyatakan pada titik tertentu dalam proses kolaborasi, para pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat mereka capai bersama. Dalam hal ini beberapa stakeholder dikutip dari hasil penelitian menyatakan bahwa tercapainya tujuan yaitu program kolaborasi dalam penanggulangan HIV/AIDS dapat tercapai dengan adanya komitmen bersama. Ketiga narasumber baik dari Parpas, KPA dan juga Dinas Kesehatan memiliki kesamaan pernyataan bahwa ketiganya sama – sama berkomitmen hal ini dibuktikan dengan kerjasama yang terjalin dari ketiga stakeholder tersebut dari mulai 2008 hingga saat ini dengan beberapa program kolaborasi yang telah dicapai. Ansell & Gash (2008) mengemukakan bahwa komitmen anggota merupakan faktor paling penting dalam memperlancar collaborative governance. Untuk itu pada pelaksanaan collaborative governance dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo menjadikan para pemangku kepentingan membangun komitmen terhadap proses.

Fokus terakhir yaitu *Intermediate Outcome* (Hasil Sementara) yang juga telah berjalan dengan baik dimana output nyata yang sudah berhasil dilakukan dalam proses kolaborasi penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo yaitu berupa beberapa program kolaborasi diantaranya adalah Pemilihan Duta Perduli AIDS, Parpas Goes to School, serta Lomba Klopen capir dan Mobile Visit.

Selanjutnya hasil sementara diharapkan dapat dicapai melalui "small win" perencanaan strategis, serta penggabungan fakta-fakta bersama (Islamy, 2018). Berdasarkan pada hasil sementara proses kolaborasi

penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat proses kolaborasi telah dilaksanakan dengan perencanaan strategis dan dengan penggabungan fakta-fakta Bersama dari masing-masing stakeholder sehingga pada implementasinya telah menghasilkan beberapa program hasil kerjasama yang merupakan program-program yang menysasar segala kalangan umur dan lapisan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo.

Adanya beberapa proses kolaborasi antar stakeholder ini merupakan beberapa hal yang berkaitan erat dalam mengatasi permasalahan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo. Program kolaborasi yang dilakukan oleh beberapa stakeholder ini dilakukan dengan menysasar berbagai kalangan dimana masing-masing stakeholder memiliki wewenang dan sasaran masing-masing generasi agar proses pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten bersifat secara menyeluruh. Selanjutnya permasalahan HIV/AIDS ini juga dilakukan secara berkelanjutan dengan adanya kolaborasi ini seperti program rutin yaitu Pemilihan Duta Perduli AIDS, Parpas *Goes to School*, serta Lomba Klopen capir dan Mobile Visit yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu dengan terus dilakukan inovasi program baru pada setiap tahunnya. Berbagai proses kolaborasi yang saat ini telah menghasilkan output nyata adalah bentuk solusi dari permasalahan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo agar kedepan menjadi daerah dengan tingkat infeksi HIV/AIDS terendah baik di tingkat provinsi maupun secara nasional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses *collaborive governance* dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo yang telah dilakukan penulis

berdasarkan 5 (lima) indikator fokus penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Face to Face Dialog* (Dialog Tatap Muka)

Fokus *Face to Face Dialog* (Dialog Tatap Muka) dalam proses *collaborative governance* dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik dimana dialog tatap muka dilakukan oleh para stakeholder terkait dalam hal ini yaitu KPA, Dinas Kesehatan dan Parpas Kabupaten Sidoarjo. Dialog tatap muka ini sebelumnya dilakukan tiga hingga empat kali dalam satu tahun secara rutin namun sejak pemberlakuan pembatasan sosial dan pemotongan dana dari APBD sebagai akibat dari Pandemi maka diubah menjadi satu kali dalam satu tahun.

2. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

Fokus kedua yaitu *Trust Building* (Membangun Kepercayaan) juga telah berjalan secara efektif dimana kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing stakeholder berkaitan erat terhadap komitmen yang terjalin pada program kolaborasi yang telah diimplementasikan. Selain komitmen, dalam membangun kepercayaan ini juga meliputi proses komunikasi yang baik sehingga dengan kedua aspek tersebut yang berjalan dengan baik maka akan meningkatkan kepercayaan satu stakeholder dengan stakeholder yang lain untuk menciptakan kualitas yang baik bagi proses kolaborasi ini.

3. *Share Understanding* (Berbagi Pemahaman)

Fokus Ketiga adalah *Share Understanding* (Berbagi Pemahaman) dimana berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pada fokus ini sudah berjalan secara efektif

dimana antar stakeholder mulai membangun kesepemahaman dalam proses kolaborasi. Kesepemahaman ini dibangun dengan saling memahami antar lintas usia dimana Parpas mewakili generasi muda dan KPA serta Dinkes merupakan seior yang bertugas dalam menyusun konsep kolaborasi. Selain itu dalam membangun kesepemahaman juga tidak lepas dari pengambilan keputusan yang tentu saja tidak lepas dari hasil kesepakatan bersama yang disetujui oleh semua pihak terkait sebab dalam hal ini merupakan proses kolaborasi.

4. *Commitment to Process* (Komitmen Terhadap Proses)

Fokus *Commitment to Process* (Komitmen Terhadap Proses) dapat dilihat dari komitmen yang terjalin antar stakeholder yang terlibat dan dalam proses kolaborasi penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo ini sudah berjalan dengan baik, dimana masing – masing perwakilan stakeholder menyatakan bahwa proses kolaborasi dilakukan dengan komitmen yang tinggi terbukti dari terlaksananya beberapa program kolaborasi dengan baik dan sesuai rencana.

5. *Intermediate Outcome* (Hasil Sementara)

Fokus terakhir yaitu *Intermediate Outcome* (Hasil Sementara) yang juga telah berjalan dengan baik dimana output nyata yang sudah berhasil dilakukan dalam proses kolaborasi penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo yaitu berupa beberapa program kolaborasi diantaranya adalah Pemilihan Duta Perduli AIDS, Parpas Goes to School, serta Lomba Klopen capir.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice.

Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.

Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3, 1–13. Retrieved from <http://repository.unair.ac.id/67685/>

Bustomi, T., Ariesmansyah, A., & Kusdiman, A. (2022). Partisipasi Publik Dalam Collaborative Governance Pada Program Sister City Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(Vol. 13 No. 1), 48–64.

Chang, H. J. (2009). Collaborative Governance In Welfare Service Delivery: Focusing On Local Welfare in Korea. *Internatonal Review Of Public Administration*.

Dwi Alamsyah, Nuryanti Mustari, Rudi Hardi, A. M. (2019). Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 04(02), 9–25.

Fawwaz Aldi Tilano, S. S. (2017). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA SEMARANG. *Rule of Law Dynamics*, 153–180.

Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan. *Wedana Jurnal Pemerintah, Politik dan Birokrasi*, II, 200–208. Retrieved from <http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824> diakses pada tanggal 5 April 2019 pukul 02:55 WIB

Islamy, L. O. (20018). *Collaborative Governnace, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish Publiser.

Kriswibowo, A., Harsanto, B. T., & Kurniasih, D. (2018). Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(2).

Pratolo, S. (2008). Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dalam Hubungannya Dengan Perwujudan Keadilan Dan Kinerja Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur Dan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 9(2), 108–124.

Rizaty, M. A. (2021). Kasus HIV di Indonesia Terus Meningkat, AIDS Cenderung Turun. *databoks katadata*.

Setiawandari, N. E. P., & Kriswibowo, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 149.

Sholahuddin, M. (2021). Di Sidoarjo, Temuan Kasus HIV/AIDS Tertinggi Ketiga di Jatim. *Jawa Pos*.